

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap proses sekuritisasi yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Donald Trump pada periode kedua tahun 2025 telah melakukan transformasi terhadap status Kartel Sinaloa dalam kerangka sekuritisasi Amerika Serikat. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian *speech act* terstruktur yang diartikulasikan oleh Donald Trump sebagai *primary securitizing actor* dan diperkuat oleh para pemangku kebijakan di bawahnya, melalui keempat proses sekuritisasi, yaitu *agenda setting*, *legitimizing future acts*, *deterrence*, dan *control*. Hasil akhir dari proses sekuritisasi tersebut adalah pergeseran status Kartel Sinaloa dari aktor kriminal transnasional yang ditangani melalui kerangka penegakan hukum konvensional, menjadi ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional Amerika Serikat yang harus dihadapi melalui *extraordinary measures* setara dengan respons terhadap ancaman terorisme global.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa isu dalam konteks *transnational organized crime* dapat bertransformasi dari isu kriminal biasa menjadi isu keamanan nasional ketika negara secara sadar menjalankan proses sekuritisasi melalui serangkaian tindakan diskursif dan kebijakan. Kartel Sinaloa, yang sebelumnya berada dalam kerangka penegakan hukum konvensional sebagai pelaku kejahatan transnasional, kini telah dikukuhkan sebagai ancaman keamanan nasional Amerika Serikat melalui proses sekuritisasi yang dijalankan pemerintahan Donald Trump pada periode kedua. Penelitian ini secara komprehensif menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa proses sekuritisasi Amerika Serikat terhadap Kartel Sinaloa terjadi secara sistematis melalui empat proses Vallin (2020), yaitu *agenda setting*, *legitimizing future acts*, *deterrence*, dan *control*, yang bekerja secara saling melengkapi untuk

Karendra Yazid Anas

**ANALISIS SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: STUDI KASUS KARTEL SINALOA
PADA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP TAHUN 2025**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

mentransformasikan status objek dari kategori kriminal-administratif ke kategori keamanan nasional.

Proses sekuritisasi tersebut termanifestasi dalam serangkaian tahapan yang berlangsung sejak hari pertama masa jabatan kedua Donald Trump. proses agenda setting terlihat dari penandatanganan Executive Order 14157 pada 20 Januari 2025 yang ditopang oleh pidato inaugurasi, memorandum Bondi tentang "total elimination", penetapan resmi oleh Rubio, kesaksian Patel di Kongres, hingga reproduksi narasi oleh media massa lintas spektrum ideologis. proses legitimizing future acts terwujud melalui penetapan Kartel Sinaloa sebagai Foreign Terrorist Organization dan Specially Designated Global Terrorist yang membuka akses ke instrumen-instrumen hukum keamanan nasional, termasuk International Emergency Economic Powers Act, ketentuan material support berdasarkan 18 U.S.C. §2339B, serta sanksi sekunder berjangkauan ekstrateritorial. proses deterrence termanifestasi melalui sinyal deklaratif "total elimination" dalam EO 14157, pernyataan publik Trump mengenai kesediaan melancarkan serangan, direktif militer rahasia pada Agustus 2025, penetapan target reward terhadap kepemimpinan Los Chapitos, serta dakwaan narco-terrorism terhadap pemimpin faksi Kartel Sinaloa. proses control terlihat dari pembentukan Homeland Security Task Force, restrukturisasi penegakan hukum yang mensubordinasikan DEA ke FBI dan DHS, sanksi sekunder OFAC terhadap Los Chapitos dengan jangkauan ekstrateritorial, hingga ekstradisi puluhan figur kartel termasuk Sinaloa oleh Meksiko ke Amerika Serikat selama 2025.

Inti dari proses sekuritisasi ini terletak pada proses pelabelan yang dijalankan oleh aktor sekuritisasi. Pelabelan Kartel Sinaloa sebagai *Foreign Terrorist Organization* bukan sekadar perubahan klasifikasi administratif, melainkan transformasi ontologis yang mengubah cara negara mengkonseptualisasikan keberadaan kartel. Melalui pelabelan, Kartel Sinaloa berpindah dari kategori "pelaku kriminal" menjadi kategori "aktor non-negara

Karendra Yazid Anas

**ANALISIS SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: STUDI KASUS KARTEL SINALOA
PADA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP TAHUN 2025**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

yang setara dengan organisasi teroris ideologis". Pergeseran kategori ini menjadi pintu masuk yang membuka seluruh perangkat *extraordinary measures* yang sebelumnya tidak dapat dijustifikasi dalam kerangka penegakan hukum konvensional. Inilah yang menjadikan pelabelan sebagai elemen paling fundamental dalam keseluruhan proses sekuritisasi.

Dari analisis empat proses sekuritisasi yang dijalankan pemerintahan Trump, proses legitimizing future acts dapat diidentifikasi sebagai proses yang paling dominan dan paling menentukan dalam konfigurasi sekuritisasi terhadap Kartel Sinaloa. Identifikasi ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar tindakan luar biasa yang dijalankan pada proses deterrence dan control, baik berupa otorisasi tindakan militer, sanksi sekunder ekstrateritorial, maupun penindakan finansial terhadap faksi-faksi kartel, hanya menjadi mungkin setelah landasan legitimasi melalui penetapan FTO dan SDGT terbentuk. Tanpa proses legitimizing future acts, agenda yang ditetapkan pada proses pertama tidak akan dapat dieksekusi menjadi tindakan konkret, dan proses deterrence maupun control akan kehilangan dasar hukum dan politiknya. Dengan demikian, proses legitimizing future acts berfungsi sebagai enabler utama yang memungkinkan keseluruhan proses sekuritisasi berlangsung secara efektif. Yang menarik dari penelitian ini adalah kecepatan eksekusi sekuritisasi yang berlangsung dalam hitungan hari pasca pelantikan, integrasi keempat proses secara terkoordinasi dalam satu administrasi, serta otorisasi *extraordinary measures* terhadap aktor kriminal non-negara, sebuah konfigurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kebijakan anti narkoba di Amerika Serikat.

Sesuai dengan kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian ini, proses sekuritisasi yang telah dianalisis pada sebelumnya, menghasilkan pengukuhan Kartel Sinaloa sebagai ancaman keamanan nasional Amerika Serikat. Hasil ini termanifestasi dalam tiga dimensi yang saling memperkuat, yaitu pergeseran status ontologis dari kategori organisasi kriminal transnasional ke kategori aktor

Karendra Yazid Anas

**ANALISIS SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: STUDI KASUS KARTEL SINALOA
PADA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP TAHUN 2025**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

non-negara yang setara dengan organisasi teroris, perluasan instrumen kewenangan negara yang melampaui kerangka penegakan hukum konvensional, serta terbentuknya konsensus diskursif lintas aktor yang menempatkan Kartel Sinaloa dalam kerangka keamanan nasional. Konsekuensi paling signifikan dari output sekuritisasi ini adalah pemindahan penanganan Kartel Sinaloa dari ranah *normal politics* yang diatur oleh prosedur hukum pidana ke ranah *emergency politics* yang membenarkan penggunaan *extraordinary measures*, termasuk instrumen militer. Dengan demikian, penelitian ini telah menjawab rumusan masalah secara komprehensif melalui pemetaan proses sekuritisasi yang dijalankan pemerintahan Trump beserta output konkret yang dihasilkannya.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa sekuritisasi yang dijalankan pemerintahan Trump terhadap Kartel Sinaloa pada 2025 bukan sekadar respon terhadap krisis fentanil, melainkan strategi politik dan keamanan Amerika Serikat untuk memperluas konsep keamanan negara dalam menanggulangi ancaman non-tradisional. Strategi ini menandai pergeseran paradigma dalam sekuritisasi Amerika Serikat, dari kerangka keamanan yang berorientasi pada ancaman negara konvensional menuju kerangka yang mengakomodasi aktor non-negara transnasional sebagai subjek keamanan nasional. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi kontribusi paling signifikan dari penelitian ini bagi pemahaman teori sekuritisasi dan praktik kebijakan keamanan kontemporer.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika sekuritisasi kejahatan transnasional. Pertama, penelitian mengenai *desekuritisasi* atau proses pengembalian isu dari ranah keamanan luar biasa ke ranah politik normal menjadi penting untuk dilakukan, terutama ketika pemerintahan Amerika Serikat di masa mendatang berpotensi mengubah

Karendra Yazid Anas

**ANALISIS SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: STUDI KASUS KARTEL SINALOA
PADA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP TAHUN 2025**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pendekatan terhadap kartel. Kedua, studi komparatif antara sekuritisasi yang dijalankan Amerika Serikat terhadap Kartel Sinaloa dengan kasus sekuritisasi *transnational organized crime* di kawasan lain, seperti Ekuador terhadap kelompok *narcoterrorist* atau Indonesia terhadap jaringan narkoba internasional, dapat memperluas pemahaman tentang variasi praktik sekuritisasi lintas konteks. Ketiga, penelitian mengenai efektivitas jangka panjang pendekatan sekuritisasi versus pendekatan penegakan hukum konvensional dalam mengurangi peredaran narkoba transnasional perlu dilakukan untuk memberikan dasar empiris bagi diskursus kebijakan ke depan.

5.2.2 Saran Praktis

Bagi pengambil kebijakan, terutama di Indonesia, penelitian ini menawarkan beberapa pembelajaran. Pertama, sekuritisasi sebagai strategi politik dapat menjadi instrumen untuk merespons ancaman non-tradisional yang tidak dapat ditangani dalam kerangka konvensional, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Amerika Serikat. Kedua, dalam sekuritisasi sangat bergantung pada konsistensi *speech act* dari aktor sekuritisasi utama dan koordinasi institusional yang terintegrasi, sehingga reformasi institusional menjadi prasyarat keberhasilan sekuritisasi. Ketiga, bagi diplomat dan praktisi hubungan internasional, penting untuk memahami bahwa proses sekuritisasi berimplikasi pada hubungan bilateral dan regional, sebagaimana terlihat dari dinamika hubungan Amerika Serikat-Meksiko pasca penetapan FTO terhadap kartel. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya menyikapi wacana sekuritisasi secara reflektif dan kritis agar proses tersebut tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban demokratis.

Karendra Yazid Anas

**ANALISIS SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: STUDI KASUS KARTEL SINALOA
PADA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP TAHUN 2025**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]